

## NOTULENSI

### Rapat Dewan Pengarah Open Government Indonesia

#### A. Pelaksanaan Rapat

Hari/ tanggal : Selasa, 24 Januari 2023  
Tempat : Hotel Borobudur, Jakarta Pusat  
Pimpinan Rapat : Bapak Slamet Soedarsono, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas  
Peserta Rapat :

- Ibu Jaleswari Pramodhawardhani, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Kantor Staf Presiden
- Bapak Yanuar Nugroho, Open Government Partnership Global Envoy
- Bapak Mugiyanto, Tenaga Ahli Utama, Kantor Staf Presiden
- Bapak Sigit Pamungkas, Tenaga Ahli Utama, Kantor Staf Presiden
- Bapak Noam Lazuardy, Diplomat Madya, Kementerian Luar Negeri
- Bapak Ahmad Faisol, Direktur Eksekutif, MediaLink
- Bapak Jim Matuli, Plt. Direktur Eksekutif, INFID
- Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Setnas OGI)
- Perwakilan dari Kantor Staf Presiden, Kementerian Luar Negeri, dan INFID

#### B. Latar Belakang Rapat

Rapat Dewan Pengarah OGI ini diselenggarakan untuk membahas dua agenda utama, yaitu: 1) Rencana peluncuran Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia Indonesia (RAN OGI) VII 2023-2024, dan 2) Penguatan tata kelola Open Government Indonesia (OGI).

#### C. Hasil Diskusi

**1. Bapak Slamet Soedarsono** memberikan pemaparan sebagai berikut:

- a. Rapat Dewan Pengarah OGI kali ini akan membahas rencana peluncuran RAN OGI VII 2023-2024 dan penguatan tata kelola OGI. Rapat ini juga akan membahas agenda OGI pada tahun 2023 secara singkat.

**Peluncuran RAN OGI VII 2023-2024**

- b. Setnas OGI telah menyusun RAN OGI VII 2023-2024, yang mengangkat enam isu strategis: (1) Anti-korupsi dan anggaran; (2) Ruang kewargaan dan demokrasi; (3) Pelayanan publik yang inklusif; (4) Akses keadilan; (5) Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI); dan (6) Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam.
- c. Peluncuran RAN OGI VII rencananya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, pukul 13.30-16.00 WIB. Untuk meningkatkan *awareness* pemangku kepentingan dan masyarakat, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Luar Negeri, dan Kepala Staf Kepresidenan diharapkan dapat hadir untuk membuka kegiatan.

## **Penguatan Tata Kelola OGI**

- d. Sebagai bagian dari rencana penguatan tata kelola OGI, *pertama*, saat ini terdapat pembukaan untuk menjadi Co-Chair OGP periode 2023-2025. Indonesia dapat mengirimkan *Letter of Interest* kepada OGP melalui Menteri PPN/Bappenas sebelum 27 Mei bila ingin mengajukan diri sebagai Co-Chair OGP. *Kedua*, sebagai perluasan anggota Dewan Pengarah OGI, standar OGP mewajibkan adanya keberimbangan representasi masyarakat dan pemerintah. Perwakilan non-pemerintah yang dapat dipertimbangkan sebagai anggota Dewan Pengarah antara lain INFID, Yayasan TIFA, ICW dan OGP Envoy.

## **Agenda OGI 2023**

- e. Terdapat 2 kegiatan internasional OGI untuk tahun 2023, *pertama*, penyelenggaraan Asia Pacific Regional Meeting untuk membahas isu strategis keterbukaan pemerintah di Asia Pasifik. Pertemuan ini direncanakan akan dilangsungkan pada Mei 2023 di Jakarta dengan pendanaan dari Ford Foundation. *Kedua*, OGP Summit 2023 akan dilaksanakan pada 4-8 September 2023 di Estonia. Ada dua hal yang perlu dipersiapkan, yaitu kesediaan Presiden RI untuk menghadiri Summit dan perwakilan delegasi yang akan menghadiri Summit.
2. **Bapak Priyanto Rohmattullah** memberikan pemaparan singkat tentang evaluasi pelaksanaan OGI tahun 2022 sebagai berikut:
    - a. Secara global, keterlibatan Indonesia dalam OGP menunjukkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan membantu dalam perluasan jejaring antar negara dan mitra pembangunan. Secara nasional, keterlibatan Indonesia dalam OGI telah meningkatkan tingkat partisipasi dan transparansi anggaran di Indonesia, serta nilai indeks persepsi korupsi.
    - b. Berdasarkan evaluasi kegiatan dan capaian 2022, diperlukan penguatan dasar hukum dan peningkatan pemberian dukungan bagi stakeholder pelaksana OGI. Sementara poin evaluasi untuk OGP, perlu ada knowledge database, standarisasi, dan panduan yang dapat memberikan *evidence* pelaksanaan keterbukaan pemerintah.
  3. **Ibu Jaleswari Pramodhawardhani** memberikan tanggapan sebagai berikut:
    - a. Kantor Staf Presiden mendukung peluncuran dan pelaksanaan RAN OGI VII 2023-2024. Untuk isu strategis, Indonesia dapat fokus pada sebagian isu dari 6 (enam) isu strategis yang telah dipetakan.
    - b. Kantor Staf Presiden mendukung penyusunan dasar hukum OGI untuk dikuatkan melalui Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).
  4. **Bapak Noam Lazuardy** memberikan tanggapan sebagai berikut:
    - a. Kerja sama dan inisiatif baru perlu dijajaki Indonesia dalam hal *capacity development* dan pendanaan. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri mendukung rencana pencalonan Indonesia sebagai Co-Chair OGP dan partisipasi dalam

Konferensi Tingkat Tinggi. Hal ini menjadi kesempatan baik untuk menunjukan capaian pembangunan pemerintah Indonesia dan untuk mempersiapkan hal tersebut memerlukan persiapan yang matang,

**5. Bapak Jim Matuli** memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. INFID siap mendukung pelaksanaan RAN OGI VII 2023-2024, dan akan berusaha mengarusutamakan OGP dalam kegiatan-kegiatan yang didorong oleh INFID. Sebagai contoh, INFID telah mengikutsertakan OGP dalam framework salah satu program kolaborasinya di Papua.

**6. Bapak Yanuar Nugroho** memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Enam isu strategis yang dipetakan sudah tepat, namun apabila harus dikerucutkan, maka isu strategis 3, 4, dan 5 dapat digabung menjadi “pelayanan publik yang adil dan inklusif”. Isu strategis ini sejalan dengan agenda Bapak Jokowi, dan dukungannya untuk RAN OGI VII dapat menjadi *framing* positif bagi sisa waktu Bapak Jokowi menjabat sebagai presiden.
- b. Rencana peluncuran akan baik bila bisa mendapatkan jadwal Bapak Menteri PPN/Bappenas, Ibu Menteri Luar Negeri, dan Bapak Kepala Staf Kepresidenan. Kegiatan dapat dilakukan secara *hybrid* dan jika bisa jangan berbentuk seminar agar lebih interaktif.
- c. Pencalonan Indonesia sebagai Co-Chair OGP akan bermanfaat, namun hal ini membutuhkan komitmen kelembagaan. Untuk hal ini diperlukan juga penguatan dasar hukum OGI berbentuk Perpres yang dapat menjadi *legacy* positif Bapak Jokowi. Terkait penyelenggaraan Asia Pacific Regional Forum diharapkan dapat dibuka oleh Bapak Presiden, dengan opsi pelaksanaan pembukaan di Istana.

**7. Bapak Ahmad Faisol** memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Menyepakati perlu adanya keberimbangan Dewan Pengarah, namun tidak perlu ditafsirkan bahwa harus secara kuantitatif, hal ini dapat dilaksanakan asalkan *engagement* OMS bermakna.
- b. Ada isu di tingkat Pusat dan Daerah selama ini terkait kontinuitas komitmen stakeholder jika ada pergantian kepemimpinan. Setnas OGI perlu memikirkan strategi untuk mengatasi isu ini.

**8. Bapak Sigit Pamungkas** memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. OGI sudah melalui satu dasawarsa, hal ini perlu dikemas dalam peluncuran RAN OGI VII 2023-2024, dalam konsep acara agar pelaksanaan dan *champion* pada setiap RAN OGI ditunjukkan.
- b. Perlu ada narasi keuntungan dan prestasi untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai Co-Chair OGP. Terkait penguatan dasar hukum agar pengusulan RPerpres dapat disetujui oleh Presiden.

**9. Bapak Slamet Soedarsono** memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Terkait Peluncuran RAN OGI VII 2023-2024:
  - 1) Perlu dibuat interaktif, agar peserta dapat turut berdiskusi. Untuk panelis, Menteri PANRB harap diundang dalam panel, sementara untuk moderator

dimohon kesediaan Bapak Yanuar Nugroho, hal ini karena lebih memahami substansi yang akan diangkat secara mendalam.

- 2) Anggota OGP Local dapat turut diundang untuk memberikan masukan dalam diskusi saat kegiatan peluncuran dan tema peluncuran dapat mengangkat tema Satu Dasawarsa OGI.
- 3) Terkait keanggotaan Dewan Pengarah OGI maka Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan dapat ditambahkan sebagai anggota Dewan Pengarah OGI hal ini dapat dilakukan dengan memperbaharui pula Kepmen PPN/Kepala Bappenas No. 88 Tahun 2018.

#### **D. Kesimpulan dan Tindak Lanjut**

##### **1. Peluncuran RAN OGI VII Tahun 2023-2024**

Peluncuran RAN OGI VII Tahun 2023-2024 akan diselenggarakan pada 7 Februari 2023, kegiatan akan dikemas dengan tema memperingati Satu Dasawarsa OGI. Sebagai tindak lanjut, jadwal Menteri PPN/Bappenas, Menteri Luar Negeri, dan Kepala Staf Kepresidenan perlu ditetapkan untuk membuka kegiatan, dan undangan perlu disampaikan bagi panelis dan peserta.

##### **2. Penguatan Tata Kelola OGI**

- a. Anggota Dewan Pengarah OGI sepakat bahwa perlu ada penguatan dasar hukum OGI dalam bentuk Peraturan Presiden.
- b. Dewan Pengarah OGI sepakat untuk memperluas keanggotaan dewan pengarah OGP dengan menambahkan perwakilan OMS, dan mengikutsertakan Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan.
- c. Dewan Pengarah OGI sepakat bahwa pencalonan Indonesia sebagai Co-Chair OGP merupakan peluang yang baik bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam mendorong keterbukaan pemerintah. Namun, OGI masih perlu memetakan manfaat konkrit yang dapat diperoleh Indonesia sebagai Co-Chair agar ada komitmen kelembagaan yang kuat.

##### **3. Agenda OGI tahun 2023**

Dewan Pengarah OGI telah membahas dua kegiatan internasional OGI untuk 2023, yaitu pelaksanaan Asia Pacific Regional Meeting di Jakarta dan OGP Summit 2023 di Estonia. Namun, masih perlu ada rapat lanjutan untuk membahas dua kegiatan ini secara lebih mendalam.

#### **Dokumentasi**

